



**EFEK MODERASI KOMITMEN ORGANISASI PADA PENGARUH IMPLEMENTASI
E-PROCUREMENT TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PENGADAAN
BARANG DAN JASA PEMERINTAH**

Oleh :

YUSNI

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Luwuk

Email : buliayusni@gmail.com

Hp : 085397505300

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh implementasi *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa dan komitmen organisasi memoderasi implementasi *e-procurement* pada pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan kuantitatif. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 132 pegawai yang merupakan pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah Kab. Banggai di tiap tiap OPD. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Structural Equation Modelling* (SEM) dengan pendekatan *Partial Least Squares* (PLS), program yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah Warp PLS 7.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa dan komitmen organisasi memoderasi implementasi *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kata Kunci : Implementasi *e-procurement*, Komitmen organisasi dan Pencegahan *fraud*.

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of the implementation of e-procurement on the prevention of fraud in the procurement of goods/services and organizational commitment to moderate the implementation of e-procurement on the prevention of fraud in the procurement of goods/services. This research was conducted using a quantitative approach. The number of samples in this study were 132 employees who were actors in the procurement of goods/services for the district government. Proud in every OPD. The analytical method used in this research is Structural Equation Modeling (SEM) with Partial Least Squares (PLS) approach, the program used to test the research hypothesis is Warp PLS 7.0. The results of the study show that the implementation of e-procurement has an effect on preventing fraud in the procurement of goods/services and organizational commitment to moderate the implementation of e-procurement on the prevention of fraud in the procurement of government goods/services.

Keywords: Implementation of e-procurement, organizational commitment and fraud prevention.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Pengadaan barang serta jasa pada pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018. Regulasi ini telah beberapa kali disempurnakan agar mendapatkan barang/jasa yang berkualitas serta terhindar dari *fraud*/kecurangan sehingga bisa bermanfaat untuk pembangunan negara. *Fraud* pada proses pengadaan barang/jasa telah tersebar di seluruh dunia sehingga lebih serius dan pada tahap lebih mengkhawatirkan di negara-negara berkembang (Iqbal, 2010; Kurniawan, 2013). Sehingga hal ini apabila dibiarkan merupakan hal yang sangat membahayakan bagi pemerintah atau organisasi, untuk itu agar pemerintah atau organisasi dapat berjalan dengan baik, secara efektif dan efisien perlu dilakukannya pencegahan kecurangan/*fraud*.

Menurut Karyono (2013) Pencegahan *fraud* merupakan segala upaya untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak, dan mengidentifikasi kegiatan yang berisiko terjadinya kecurangan/*fraud*, untuk itu pada proses pengadaan barang dan jasa perlu adanya transparansi (keterbukaan) dan non-diskriminatif sehingga proses pengadaan barang dan jasa bisa berjalan secara efektif dan efisien. Keterbukaan (transparansi) pada proses pengadaan barang/jasa dimaksudkan adalah dengan memberikan informasi secara luas dan jelas kepada seluruh calon peserta yang berpotensi mengikuti proses tender tanpa terkecuali, calon peserta juga harus diperlakukan secara adil dalam setiap tahapan, sehingga tidak terdapat perlakuan diskriminatif diantara para peserta dan juga pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan tanpa harus bertemu (Anggraini, 2013). Untuk meningkatkan transparansi pada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan secara elektronik yaitu dengan mengimplementasikan *e-procurement* pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

Menurut Sutedi (2012) *e-procurement* adalah sebuah website yang merupakan sistem pengadaan barang/jasa oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi berbasis internet. Penelitian tentang sistem *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah telah banyak dilakukan diantaranya penelitian Luh Putu Resti Mega Artantri (2016), dan Danuta (2017) yang menyatakan bahwa implementasi *e-procurement* meningkatkan transparansi dan berjalan adil sehingga tingkat kecurangan dapat diminimalisir, kemudian diperkuat oleh penelitian Arasy Ghazali Akbar (2019), yang menyatakan implementasi *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sejalan dengan beberapa penelitian dan kajian tentang manfaat implementasi *e-procurement*, ternyata masih menyisakan kendala dan tantangan dalam penerapannya. Peran sumber daya manusia, sarana dan prasarana (keterbatasan server dan petunjuk operasional),

dan dana masih menjadi kendala dalam pelaksanaan *e-procurement* (Yuwinanto, 2013). Praktek kecurangan (*fraud*) dalam proses pengadaan masih terjadi walaupun telah dilakukan secara elektronik hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango yang menyebutkan, bahwa pada kasus korupsi yang ditangani KPK 70% terkait pada pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. (Nawawi dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi yang disiarkan akun youtube KPK, Rabu (26/8/2020). (<https://nasional.kompas.com/2020>))

Tingginya intensitas *fraud* ini seharusnya menyadarkan semua pihak untuk membangun komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan komitmen yang tercipta dari semua individu yang menjalankan oprasional organisasi. Pegawai yang berkomitmen pada organisasinya maka akan mengerti bahwa tujuan bekerja adalah untuk kepentingan organisasi, dengan hal ini maka komitmen organisasi bisa mempengaruhi kecurangan yang dilakukan pegawai. Semakin besar komitmen pegawai pada organisasinya, dapat menekan tindakan kecurangan pada organisasi tersebut (Kurniawan, 2013). Sehingga proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan pada sistem *e-procurement* akan berjalan dengan efektif dan efisien sehingga dapat meminimalisir kecurangan. Hasil Penelitian Salim (2016) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi memoderasi implementasi *e-procurement* dalam mencegah *fraud* pada pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pernyataan Yuwinanto (2013) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi ini merupakan satu kendala dalam pelaksanaan kebijakan *e-procurement*.

Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian efek moderasi komitmen organisasi pada pengaruh implementasi sistem *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah di Kab. Banggai.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah implementasi *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah Kab. Banggai?
2. Apakah komitmen organisasi memoderasi implementasi *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah Kab. Banggai?

c. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh implementasi *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah Kab. Banggai.

2. Untuk menganalisis komitmen organisasi dalam memoderasi implementasi *e-procurement* pada pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah Kab. Banggai?

d. Landasan Teori

1. Teori *Triangle Fraud*

Teori *fraud triangle* adalah sebuah gagasan tentang penyebab terjadinya kecurangan. Gagasan ini diciptakan pertama kali oleh Cressey (1953) dan diperkenalkan dalam literature professional pada SAS No. 99 yang bernama *triangle fraud*. menjelaskan tiga faktor penyebab hadir situasi *fraud* yaitu :

1. *Pressure* (tekanan) merupakan suatu tindakan melakukan *fraud* karena adanya insentif/tekanan/kebutuhan. Tekanan dapat mencakup hampir semua hal termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain termasuk hal keuangan dan non-keuangan. Menurut SAS No.99 terdapat empat jenis kondisi yang umum terjadi pada *pressure* yang dapat mengakibatkan kecurangan, yaitu *financial stability*, *external pressure*, *personal financial need*, dan *financial targets*.
2. *Opportunity* (kesempatan), yaitu situasi yang membuka kesempatan untuk memungkinkan suatu kecurangan terjadi. Biasanya terjadi karena pengendalian internal yang lemah, kurangnya pengawasan dan penyalagunaan wewenang. Diantara elemen *fraud triangle* yang lain *opportunity* merupakan elemen yang paling memungkinkan diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan upaya deteksi dini terhadap *fraud*.
3. *Rationalization* (rasionalisasi) merupakan sikap/karakter yang memperbolehkan pihak-pihak tertentu melakukan kecurangan, atau orang dalam lingkungan yang cukup menekan sehingga membuat mereka merasionalisasi tindakan *fraud*.

2. Pengertian *E-procurement*

Menurut Sutedi (2012) mendefinisikan *e-procurement* sebagai berikut :”Sebuah website yang merupakan sistem lelang dengan pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi berbasis internet. *E-procurement* tidak hanya terkait dengan proses pembelian saja, tetapi meliputi negosiasi-negosiasi elektronik dan pengambilan keputusan atas kontrak-kontrak dengan pemasok”

3. Komitmen Organisasi

Komitmen dalam organisasi adalah suatu konstruk psikologis yang merupakan hubungan anggota organisasi dengan organisasinya yang memiliki implikasi pada keputusan agar melanjutkan keanggotaannya dalam berorganisasi atau tidak (Allen, 1997).

4. Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

Menurut Karyono (2013) mendefinisikan pencegahan kecurangan (*fraud*) sebagai berikut “Pencegahan *fraud* merupakan segala upaya untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak, dan mengidentifikasi kegiatan yang berisiko terjadinya kecurangan (*fraud*)”.

II. HIPOTESIS PENELITIAN

H1 : Implementasi *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah Kab. Banggai.

H2 : Komitmen organisasi memoderasi implementasi *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah Kab. Banggai.

III. METODE PENELITIAN

a. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai. Waktu penelitian dilaksanakan kurang lebih dua bulan yaitu bulan januari dan february 2021.

b. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Pelaku Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang tersebar di seluruh OPD Kabupaten Banggai berjumlah 196 Orang (Sumber Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kab.Banggai). Setelah menentukan populasi penelitian, selanjutnya dilakukan penarikan sampel. Untuk menentukan ukuran sampel atau jumlah sampel yang dibutuhkan digunakan rumus slovin sebagai berikut (Akdon, 2006).

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

Dimana :

n = ukuran sampel;

N = besar populasi;

e = derajat kekeliruan. Derajat kekeliruan di dalam penelitian ini 5%.

Berdasarkan jumlah populasi dan dengan menggunakan presisi 5 %, maka jumlah sampel yang diperoleh dengan menggunakan rumus diatas adalah sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

$$n = 196$$

$$\frac{196}{1+(196 \times 0,05^2)}$$

$$= 131.543 \text{ (dibulatkan = 132)}$$

Setelah jumlah sampel ditentukan, selanjutnya dilakukan penentuan responden. Responden dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi pelaku pengadaan barang/jasa di tiap-tiap OPD Kabupaten Banggai. Alasan pemilihan Pelaku pengadaan barang/jasa menjadi responden adalah karena pihak-pihak tersebut yang bertanggungjawab terhadap pengadaan barang/jasa tiap-tiap OPD di Kabupaten Banggai. Daftar sampel dan jumlah responden pada masing-masing OPD adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Daftar Sampel dan Responden pada OPD Kabupaten Banggai

No.	Nama OPD	Jumlah Responden
1	Sekretariat Daerah	13
2	Sekretariat DPRD	2
3	Dinas Pendidikan	4
4	Dinas Pariwisata	5
5	Dinas Pemuda dan Olah Raga	4
6	Dinas Kesehatan	6
7	Dinas Sosial	3
8	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4
11	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3
13	Dinas Perdagangan	3
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	5
17	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	7
18	Dinas Perhubungan	3
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12
20	Dinas Lingkungan Hidup	5
21	Dinas Ketahanan Pangan	3
22	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	4
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4
24	Dinas Perikanan	4
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2
26	Inspektorat	5
27	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	5
29	Badan Pendapatan Daerah	3
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3

31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2
Jumlah		132

Sumber : *SETDA Kabupaten Banggai dan Bagian Pengadaan barang/jasa Kabupaten Banggai tahun 2021 (diolah Kembali)*

c. Metode Pengumpulan Data

1. Penggunaan Kuesioner,

Kuesioner, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2014). Kuesioner dalam penelitian ini berisi beberapa pertanyaan yang berkaitan tentang variabel penelitian. Dalam penulisan kuesioner pertanyaan yang disusun harus memperhatikan isi pertanyaan, bahasa yang digunakan mudah dipahami, pertanyaan yang sama tidak dibuat ganda, panjang pertanyaan, urutan pertanyaan dan penampilan fisik kuesioner.

2. Observasi

Pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala fisis dan kemudian dilakukan pencatatan, dalam kaitannya dengan penelitian ini penulis langsung ke lapangan menjadi partisipan untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu Implementasi *e-procurement*, komitmen organisasi dan pencegahan *Fraud* Pengadaan barang/jasa.

3. Dokumentasi

Sekalipun dalam penelitian ini kebanyakan data diperoleh dari sumber manusia melalui penyebaran kuesioner, akan tetapi belumlah cukup lengkap, perlu adanya penguatan atau penambahan data dari sumber lain yaitu dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan membaca, mempelajari, mengidentifikasi, dan menganalisis literatur, laporan penelitian, dokumen-dokumen tertulis serta sumber bacaan lainnya yang memiliki relevansi dalam penelitian ini.

d. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber secara langsung tanpa melalui media perantara. Pada penelitian ini data primer bersumber langsung dari responden.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Data ini merupakan data yang diperoleh atau didapatkan melalui media perantara atau dicatat

oleh pihak lain. Data skunder dalam penelitian ini berupa informasi mengenai profil masing-masing bagian dan jumlah karyawan yang menjadi populasi.

e. Defenisi Oprasional

Variabel penelitian terdiri dari satu variabel dependen yaitu Pencegahan fraud (y), satu variabel independen yakni Implementasi *e-procurement* (x). dan satu variabel moderasi (z) yaitu Komitmen organisasi. Masing-masing variabel diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Pencegahan *Fraud* (y) yaitu segala upaya untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak, dan mengidentifikasi kegiatan yang berisiko terjadinya kecurangan (*fraud*), Indikatornya menurut Karyono (2013) menggunakan *triangle fraud* yaitu :
 - a. Mengurangi tekanan situasional yang menimbulkan fraud
 - b. Mengurangi kesempatan melakukan kecurangan
 - c. Memperkuat intergritas pribadi
2. Implementasi *e-procurement* (x) yaitu sebuah website yang merupakan sistem lelang dengan pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi berbasis internet (Sutedi, 2012). Indikatornya menurut (Presiden, No 70Tahun 2012) :
 - a. Persiapan Pengadaan
 - b. Pengumuman Pelelangan
 - c. Pendaftaran peserta lelang
 - d. Penjelasan pelelangan
 - e. Proses evaluasi
 - f. Lelang gagal dan pelelangan ulang
 - g. Pengumuman calon pemenang lelang
 - h. Sanggah/Ketidak sepakatan pada hasil dari proses pemilihan
 - i. Pasca pengadaan
 - j. E-tendering
 - k. E-Bidding
 - l. E-Catalog
 - m. E-Purchasing
3. Komitmen organisasi (z) yaitu suatu konstruk psikologis yang merupakan karakteristik hubungan anggota organisasi dengan organisasinya dan memiliki implikasi terhadap keputusan individu untuk melanjutkan keanggotaannya dalam berorganisasi. Indikatornya menurut Allen (1997) yaitu :

- a. Keterikatan emosional pegawai dengan organisasinya
- b. Keterlibatan diri dalam organisasi
- c. Persepsi atas kurangnya alternatif pekerjaan yang lain
- d. Tanggung jawab atas pekerjaan
- e. Memiliki kesadaran bahwa komitmen terhadap organisasi merupakan hal yang seharusnya dilakukan

f. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik SEM, sehingga evaluasi yang dilakukan terhadap dua model yaitu *outer model* dan *inner model*, dan uji hipotesis, program yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah Warp PLS 7.0.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Penelitian

1. Variabel Implementasi *E-Procurement* (X)

Implementasi *e-procurement* merupakan penerapan sebuah website sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet. Variabel implementasi *E-procurement* (X) terdiri dari 16 item pernyataan dalam kuesioner penelitian. Tanggapan responden pada variabel implementasi *e-procurement* (X) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Tanggapan responden Variabel Implementasi *E-procurement*

No	Pernyataan	Jawaban Responden										Mean
		SS		S		RR		TS		STS		
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	
1	Pejabat Pengadaan memasukkan ke dalam SPSE tentang metode pemilihan penyedia barang/jasa. (X.1)	98	74%	30	23%	2	2%	2	2%	0	0%	4.70
2	Pejabat Pengadaan memasukkan ke dalam SPSE tentang metode penyampaian dokumen penawaran (X.2)	96	73%	30	23%	4	3%	2	2%	0	0%	4.67
3	Pejabat Pengadaan memasukkan ke dalam SPSE tentang harga perkiraan sendiri.(X.3)	86	65%	45	34%	0	0%	1	1%	1	1%	4.64
4	Pejabat Pengadaan memasukkan ke dalam SPSE tentang persyaratan kualifikasi.(X.4)	101	77%	29	22%	2	2%	0	0%	0	0%	4.75
5	Pejabat Pengadaan mengumumkan paket lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (X.5)	95	72%	36	22%	1	1%	0	0%	0	0%	4.71

6	Masyarakat umum dapat melihat pengumuman pengadaan di website LPSE yang bersangkutan (X.6)	82	62%	50	38%	0	0%	0	0%	0	0%	4.62
7	Penyedia melakukan pendaftaran sebagai peserta lelang pada paket pekerjaan yang diminati kemudian mengunduh (download) dokumen pengadaan/lelang paket pekerjaan tersebut. (X.7)	80	61%	50	38%	2	2%	0	0%	0	0%	4.59
8	Proses evaluasi administrasi terhadap file penawaran dilakukan secara manual (off line) di luar SPSE, dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut dimasukkan ke dalam SPSE (X.8)	46	35%	57	43%	14	11%	13	10%	4	3%	4.02
9	SPSE secara otomatis mengirim informasi pengumuman pemenang melalui email kepada seluruh peserta lelang paket pekerjaan tersebut.(X.9)	82	62%	49	37%	0	0%	1	2	0	0%	4.61
10	Dengan selesainya proses pengadaan melalui SPSE, Pejabat Pengadaan menyampaikan Surat Penetapan Pemenang kepada pemenang lelang secara tertulis disertai dengan asli dokumen penawaran paket pekerjaan tertentu.(X.10)	66	50%	58	44%	3	2%	5	4%	0	0%	4.40
11	Pemenang lelang melakukan penandatanganan kontrak dengan pejabat terkait. (X.11)	90	68%	32	24%	6	5%	3	2%	1	1%	4.57
12	Tata cara pemilihan pemasok dalam sistem e-tendering dilakukan secara terbuka. (X.12)	104	79%	28	21%	0	0%	0	0%	0	0%	4.79
13	Dalam sistem e-tendering dapat diikuti oleh semua pemasok yang terdaftar pada sistem pengadaan elektronik. (X.13)	88	67%	42	32%	2	2%	0	0%	0	0%	4.65
14	Dalam sistem e-catalogue memuat daftar barang, jenis barang dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa.(X.14)	111	84%	21	16%	0	0%	0	0%	0	0%	4.84
15	Dalam sistem e-catalogue memuat spesifikasi teknis detail barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa.(X.15)	90	68%	39	30%	3	2%	0	0%	0	0%	4.66
16	Dalam sistem e-purchasing tata cara pembelian barang dan jasa menggunakan sarana e-catalogue.	98	74%	34	26%	0	0%	0	0%	0	0%	4.74

(X.16)													
Rata-Rata Variabel Implementasi <i>e-procurement</i> (X1)											4.66		

Sumber : Data diolah, 2021

2. Variabel Komitmen Organisasi (Z)

Komitmen organisasi merupakan sikap yang ditunjukkan oleh individu dengan adanya keterlibatan serta loyalitas terhadap organisasi. adanya keinginan untuk tetap berada dalam organisasi dan tidak bersedia untuk meninggalkan organisasinya dengan alasan apapun. Variabel komitmen organisasi (Z) terdiri dari 9 item pernyataan. Tanggapan responden variabel komitmen organisasi (Z) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Tanggapan Responden Variabel Komitmen Organisasi (Z)

No	Pernyataan	Jawaban Responden										Mean
		SS		S		N		TS		STS		
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	
1	Saya merasa terikat secara emosional dengan organisasi dimana tempat saya bekerja (Z.1)	98	74%	31	23%	2	2%	1	1%	0	0%	4.71
2	Saya merasa ikut memiliki organisasi di tempat saya bekerja (Z.2)	97	73%	35	27%	0	0%	0	0%	0	0%	4.73
3	Organisasi di tempat saya bekerja ini sangat berarti bagi saya (Z.3)	90	68%	37	28%	3	2%	2	2%	0	0%	4.63
4	Saya merasa menjadi bagian dari organisasi tempat saya bekerja (Z.4)	95	72%	34	26%	3	2%	0	0%	0	0%	4.70
5	Saya merasa Masalah organisasi di tempat saya bekerja juga seperti masalah saya (Z.5)	84	64%	37	28%	10	8%	1	1%	0	0%	4.55
6	Saya mau berusaha di atas batas normal untuk mensukseskan organisasi di tempat saya bekerja (Z.6)	68	52%	48	36%	9	7%	6	5%	1	1%	4.33
7	Saat ini saya tetap bekerja karena komitmen terhadap organisasi tempat saya bekerja (Z.7)	86	65%	46	35%	0	0%	0	0%	0	0%	4.65
8	Saya merasa tidak komitmen jika meninggalkan organisasi ditempat saya bekerja (Z.8)	79	60%	46	35%	4	3%	4	3%	3	2%	4.52
9	Saya merasa tidak loyalitas terhadap organisasi jika saya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan saya (Z.9)	77	58%	46	35%	7	5%	7	5%	2	2%	4.50
Rata-Rata Variabel Komitmen Organisasi (X2)											4.59	

Sumber : Data diolah, 2021

3. Variabel Pencegahan Fraud (Y)

Pencegahan *fraud* adalah segala upaya untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak, dan mengidentifikasi kegiatan yang beresiko terjadinya kecurangan (*fraud*). Variabel pencegahan *fraud* (Y) terdiri dari 10 item pernyataan. Tanggapan responden variabel pencegahan *fraud* (Y) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Variabel Pencegahan Fraud

No	Indikator	Jawaban Responden										Mean
		SS		S		N		TS		STS		
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	
1	Sistem pengendalian intern pengadaan barang/jasa efektif dilaksanakan. (Y.1)	55	42%	72	55%	4	3%	1	1%	0	0%	4.37
2	Implementasi praktik yang sehat dalam sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa.(Y.2)	66	50%	62	47%	3	2%	1	1%	0	0%	4.46
3	Pengunggahan dokumen pengadaan barang/jasa asli dan tidak fiktif oleh para penyedia barang dan jasa pada <i>e-procurement</i> . (Y.3)	64	48%	64	48%	2	2%	2	2%	0	0%	4.44
4	Pejabat dan pelaksana pengadaan barang/jasa memahami peraturan yang ada. (Y.4)	80	61%	52	39%	0	0%	0	0%	0	0%	4.61
5	Tidak adanya indikasi hubungan istimewa (dalam manajemen, keluarga sedarah/semenda, dan/atau kepemilikan saham) antara penyedia barang/jasa dengan pejabat/panitia pengadaan barang/jasa (Y.5)	77	58%	52	39%	3	2%	0	0%	0	0%	4.56
6	Para pejabat objektif terkait dengan pengadaan barang/jasa terhadap penyedia barang/jasa.(Y.6)	77	58%	54	41%	1	1%	0	0%	0	0%	4.58
7	Sikap “menyiasati” pengadaan barang/jasa untuk meng-”goal”kan tujuan memperkaya diri/orang lain merupakan hal yang tidak biasa terjadi. (Y.7)	58	44%	60	45%	7	5%	5	4%	2	2%	4.27
8	Tidak Terjadi moral hazard pada pejabat terkait, panitia pengadaan, atau pada rekanan/penyedia barang dan jasa. (Y.8)	54	41%	70	53%	8	6%	0	0%	0	0%	4.35
9	Kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan dijaga dengan baik. (Y.9)	71	54%	60	45%	0	0%	1	1%	0	0%	4.52

10	Persekongkolan antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur tidak terjadi. (Y.10)	62	47%	60	45%	7	5%	3	2%	0	0%	4.37
Rata-Rata Variabel Pencegahan Fraud (Y)												4.45

Sumber : Data diolah, 2021.

b. Hasil Uji Statistik

1. Evaluasi *Outer Model*

Pengujian Validitas

Hasil uji validitas dengan teknik PLS program warppls 7.0 menjelaskan implementasi *e-procurement* (x), komitmen organisasi (z), dan pencegahan fraud (Y) adalah valid. Hasil uji validitas konvergen pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Hasil Pengujian Validitas Konvergen

Indikator	X1	Z	Y	SE	P-Value	Keterangan
X.1	0.587	0.052	-0.111	0.076	<0.001	Memenuhi Convergen Validity
X.2	0.753	-0.087	-0.140	0.073	<0.001	Memenuhi Convergen Validity
X.3	0.590	-0.068	-0.268	0.076	<0.001	Memenuhi Convergen Validity
X.4	0.753	-0.141	-0.136	0.073	<0.001	Memenuhi Convergen Validity
X.5	0.622	-0.051	-0.100	0.075	<0.001	Memenuhi Convergen Validity
X.6	0.626	0.064	-0.181	0.075	<0.001	Memenuhi Convergen Validity
X.7	0.578	0.083	-0.102	0.076	<0.001	Memenuhi Convergen Validity
X.8	0.567	-0.145	-0.089	0.087	<0.001	Memenuhi Convergen Validity
X.9	0.634	0.384	0.078	0.078	<0.001	Memenuhi Convergen Validity
X.10	0.564	0.002	0.193	0.079	<0.001	Memenuhi Convergen Validity
X.11	0.706	-0.055	0.243	0.074	<0.001	Memenuhi Convergen Validity
X.12	0.688	-0.019	0.274	0.074	<0.001	Memenuhi Convergen Validity
X.13	0.726	0.005	0.189	0.073	<0.001	Memenuhi Convergen Validity
X.14	0.665	0.017	0.075	0.074	<0.001	Memenuhi Convergen Validity
X.15	0.715	0.006	0.078	0.073	<0.001	Memenuhi Convergen Validity
X.16	0.766	-0.030	-0.068	0.073	<0.001	Memenuhi Convergen Validity
Z.1	-0.041	0.801	0.054	0.072	<0.001	Memenuhi Convergen Validity
Z.2	0.160	0.724	-0.191	0.073	<0.001	Memenuhi Convergen Validity
Z.3	0.011	0.823	-0.118	0.072	<0.001	Memenuhi Convergen Validity
Z.4	0.119	0.725	0.019	0.073	<0.001	Memenuhi Convergen Validity
Z.5	-0.070	0.739	-0.101	0.073	<0.001	Memenuhi Convergen Validity
Z.6	-0.041	0.717	-0.064	0.073	<0.001	Memenuhi Convergen Validity
Z.7	0.165	0.661	0.181	0.074	<0.001	Memenuhi Convergen Validity
Z.8	-0.203	0.765	0.177	0.073	<0.001	Memenuhi Convergen Validity
Z.9	-0.067	0.758	0.058	0.073	<0.001	Memenuhi Convergen Validity
Y.1	0.063	0.156	0.741	0.073	<0.001	Memenuhi Convergen Validity
Y.2	0.038	0.013	0.854	0.071	<0.001	Memenuhi Convergen Validity
Y.3	0.098	-0.109	0.765	0.073	<0.001	Memenuhi Convergen Validity
Y.4	0.071	-0.154	0.818	0.072	<0.001	Memenuhi Convergen Validity

Y.5	-0.032	0.021	0.900	0.070	<0.001	Memenuhi Convergen Validity
Y.6	-0.015	-0.008	0.942	0.070	<0.001	Memenuhi Convergen Validity
Y.7	-0.105	0.066	0.641	0.075	<0.001	Memenuhi Convergen Validity
Y.8	-0.081	0.090	0.820	0.072	<0.001	Memenuhi Convergen Validity
Y.9	0.068	-0.211	0.691	0.074	<0.001	Memenuhi Convergen Validity
Y.10	-0.155	0.185	0.534	0.077	<0.001	Memenuhi Convergen Validity

Sumber : *output combine loading and cross-loading Warp PLS. 7.0*

Berdasarkan hasil pengujian validitas konvergen pada tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai *loading* untuk setiap indikator > 0,50 yang berarti sudah memenuhi kriteria *convergent validity*. Selanjutnya nilai *P-value* juga telah memenuhi syarat yaitu memiliki nilai sebesar <0,001 (< 0,05) untuk semua indikator pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini.

Pengujian Realibilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini diukur dengan dua kriteria yaitu *composite reliability* dan *cronbach's alpha*. Hasil pengujian *composite reliability* dan *cronbach's alpha* dalam penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6. Evaluasi outer model

	X	Z	Y	Kriteria
Nilai <i>Composite Reliability</i>	0.906	0.919	0.938	>0.70
Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	0.886	0.900	0.925	>0.60

Sumber : *Data diolah, 2021.*

Berdasarkan tabel diatas bahwa nilai *composite reliability* untuk masing-masing variabel memiliki nilai >0,70, dan *nilai cronbach alpha* untuk masing-masing variabel memiliki nilai >0,60. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua variabel dalam penelitian ini memenuhi realibilitas.

2. Evaluasi Inner Model

Hasil pengujian kecocokan model dengan analisis PLS program warppls 7.0 dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :

<p>Model fit and quality indices</p> <p>-----</p> <p>Average path coefficient (APC)= 0.349, P<0.001</p> <p>Average R-squared (ARS)= 0.130, P=0.032</p> <p>Average adjusted R-squared (AARS)= 0.116, P=0.043</p> <p>Average block VIF (AVIF)= 3.783, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3</p> <p>Average full collinearity VIF (AFVIF)= 1.253, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3</p>

Sumber : *output model fit and quality indices warp PLS. 7.0*

Gambar 1. Pengujian kecocokan model

Berdasarkan hasil pengujian kecocokan model pada gambar 1 dapat dilihat bahwa indeks *average path coefficient* (APC) sebesar 0.349 dengan nilai *p-value* sebesar < 0.001 kurang dari < 0.05 . Indeks *average R— squared* (ARS) sebesar 0.130 dengan nilai *p-value* sebesar 0.032 kurang dari < 0.05 . Nilai AVIF sebesar $3.783 < 5.0$. Hasil pengujian tersebut memberikan makna bahwa kriteria pengujian kecocokan model dalam penelitian ini sudah terpenuhi, sehingga *inner model* dapat diterima.

3. Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 7. Hasil pengujian hipotesis

Hipotesis	<i>p-values</i>	koefisien regresi (b)
H ₁	0.01	0.19
H ₂	< 0.01	0.51

Sumber : Data diolah, 2021.

Berdasarkan informasi pada tabel 7 terkait dengan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

H₁ : Implementasi *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel 7 nilai *p-values* lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu $0.01 > 0.05$. Dengan demikian maka dinyatakan bahwa hipotesis pertama (H₁) **diterimah**. Hasil tersebut dapat dimaknai bahwa implementasi *e-procurement* secara statistik berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.

H₂ : Komitmen Organisasi Terbukti memoderasi implementasi *e-Procurement* terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan melihat *p-values* pada output *warpPLS 7.0* yang telah disajikan pada tabel 7 menunjukkan bahwa nilai *p-values* sebesar < 0.01 , nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0.05. Hasil pengujian pada hipotesis kedua (H₂) **diterimah**. Hasil tersebut memberikan makna bahwa variabel Komitmen Organisasi dapat memoderasi dengan memperkuat hubungan antara implementasi *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.

c. Pembahasan

1. Pengaruh implementasi *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa implementasi *e-procurement* secara statistik berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai. Hasil pengujian tersebut memberikan arti bahwa pengimplementasi *e-procurement* pada proses pengadaan/barang/jasa dapat mendorong peningkatan pencegahan *fraud* di Kabupaten Banggai.

Temuan penelitian ini mendukung teori *triangle fraud* yang berpandangan bahwa kesempatan terjadinya kecurangan dapat dicegah dengan menerapkan sistem yang efektif dan menjelaskan bahwa ruang lingkup *fraud* pengadaan barang/jasa dapat dipersempit melalui pengimplementasian sistem berbasis elektronik atau *e-procurement* di dalam suatu organisasi, sehingga dapat mengurangi kesempatan untuk melakukan kecurangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Arasy Ghazali Akbar (2019), Luh Putu Resti Mega Artantri (2016), dan Danuta (2017) dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa implementasi *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah.

2. Moderasi Komitmen Organisasi pada Implementasi *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.

Berdasarkan pembuktian hipotesis menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi dapat memoderasi Implementasi *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pada lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Banggai. Pengimplementasian sistem *e-procurement* pada proses pengadaan barang/jasa akan berjalan dengan baik bila didukung dengan komitmen pegawai untuk tidak melakukan kecurangan sehingga dapat menekan adanya tindakan kecurangan dalam suatu organisasi.

Tanggapan responden terhadap variabel komitmen organisasi menunjukkan bahwa pegawai dalam lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Banggai memiliki komitmen organisasi yang tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dengan rasa memiliki terhadap organisasi. Tingginya komitmen organisasi oleh pegawai dalam lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dapat mendukung kelancaran pelaksanaan sistem *e-procurement* pada proses pengadaan barang/jasa. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi pernyataan dari Kurniawan (2013) semakin besar komitmen pegawai terhadap organisasinya dapat menekan tindakan kecurangan pada organisasi tersebut.

Sehingga proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan pada sistem *e-procurement* akan berjalan dengan efektif dan efisien sehingga dapat meminimalisir kecurangan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Salim (2016) yaitu komitmen organisasi dapat memoderasi implementasi *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah.

V. PENUTUP

1. Simpulan

1. Implementasi *e-procurement* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.
2. Komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan antara Implementasi *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pada lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Banggai

2 Saran

1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai agar lebih efektif dan efisien pelaksanaan sistem *e-procurement* pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2. Diharapkan agar Pegawai Pemerintah Daerah Kab. Banggai lebih meningkatkan komitmen terhadap organisasinya.
3. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar variabel pada penelitian ini dapat dikembangkan dengan berbagai macam indikator yang bisa mengukur konstruk pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akdon, D. R. (2006). *Aplikasi Statistika Dan Metode Penelitian Untuk Administrasi Dan Manajemen*. Bandung: Dewa Ruci.
- Allen, J. P. M. A. N. J. (1997). *Commitment In The Workplace : Theory, Research, And Application*. Sage Publication London.
- Anggraini, A. M. T. (2013). *Sinergi Bumn Dalam Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Dalam Perspektif Persaingan Usaha*. *Mimbar Hukum* 25(3), 15.
- Arasy Ghazali Akbar, R., Wuryan Andayani. (2019). *Pengaruh Implementasi E-Procurement Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Dengan Budaya Etis Organisasi Sebagai Pemoderasi*. *Jurnal Economia*, Vol. 15, No. 1, 13.
- Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money, Nj : Patterson Smith*.
- Danuta, K. S. (2017). *Crowe's Fraud Pentagon Theori Dalam Pencegahan Fraud Pada Proses Pengadaan Melalui E-Procurement*. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1, 11.

- Iqbal, M. S. (2010). *Can E-Governance Hold Back The Relationships Between Stakeholders Of Corruption? An Empirical Study Of A Developing Country*. Economics And Business, Xiii 24.
- Karyono. (2013). *Forensik Fraud*. Yogyakarta.
- Kurniawan, M. (2013). *Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Organisasi Publik (Studi Empiris Pada Skpd Pemerintah Kabupaten Kerinci)*. Universitas Negeri Padang
- Luh Putu Resti Mega Artantri, L. H., Endar Pituringsih. (2016). *Peran E-Procurement terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Di Pulau Lombok*. Neo~Bis, 10, 17.
- Presiden, P. (No 70 tahun 2012). *Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*.
- Salim, S., Syamsuddin. (2016). *Efek Moderasi Komitmen Organisasi Pada Pengaruh Implementasi E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*. Jurnal Analisis, 5, 8.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, A. (2012). *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuwinanto, H. P. (2013). *Implementasi E-Procurement Pada Pemerintah Kota Surabaya*. Jejaring Administrasi Publik, 5.